



MODUL
TEMA 12

Menata Wilayah Kehidupan

GEOGRAFI PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020



MODUL
TEMA 12

Menata Wilayah Kehidupan

GEOGRAFI PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

Geografi Paket C Setara SMA/MA Kelas XII
Modul Tema 12 : Menata Wilayah Kehidupan

- **Penulis:** Ardi Anto; Aftri Plantianti
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 48 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, 1 Juli 2020
Plt. Direktur Jenderal



Hamid Muhammad

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Pengantar Modul	1
Petunjuk Penggunaan Modul	2
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul	3
Bagan Materi Pembelajaran	3
UNIT 1 INDONESIA MASA DEPAN BANGSAKU	4
A. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Indonesia	5
B. Wilayah Geografis Pembangunan	13
Penugasan 1	16
Kegiatan Tutorial 1	16
Latihan	17
UNIT 2 MENATA INDONESIA SEMAKIN MAJU	20
A. Tata Ruang Indonesia	21
B. Mengatasi Permasalahan Tata Ruang	28
C. Pengembangan Wilayah Melalui Pembangunan	
Berkelanjutan	29
Penugasan 2	34
Kegiatan Tutorial 2	34
Latihan	35
Penugasan Akhir	37
Rangkuman	39
Kunci Jawaban	40
Penilaian	42
Kriteria Pindah Modul	46
Saran Referensi	47
Daftar Pustaka	47
Profil Penulis	48



Menata Wilayah Kehidupan



Pengantar Modul

Ingatkah Anda, pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 74 tahun 2019, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di depan MPR dan DPR terkait akan dipindahkannya Ibu Kota Negara Republik Indonesia? Pernyataan Presiden yang akan memindahkan Ibu Kota Negara mendapat sambutan yang meriah. Berbagai pihak dan golongan merasa senang dan berharap pemindahan tersebut dilakukan secepatnya. Bahkan beberapa kepala daerah di Kalimantan antusias menawarkan diri untuk menerima pindahnya ibu kota tersebut. Menurut Anda, alasan apa yang menyebabkan Presiden ingin memindahkan ibu kota? Perubahan apa yang akan terjadi dengan adanya pemindahan ibu kota tersebut?

Perlu kita sadari bahwa wilayah Indonesia terdiri dari berpulau-pulau yang terpisahkan oleh laut mulai dari Sabang yang berada di ujung barat Indonesia sampai Merauke yang berada di ujung timur Indonesia. Pulau-pulau yang berjajar saling menyambung tersebut memiliki perbedaan karakteristik wilayah. Bukan sekedar perbedaan kondisi geografis, tetapi juga di bidang sosial dan budaya. Perbedaan ini harus mampu dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan baik agar tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui penataan ruang kewilayahan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945. Penataan ruang Indonesia harus disesuaikan dengan visi misi bangsa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Jangka Menengah, maupun Jangka Panjang. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Perencanaan penataan ruang Nasional harus dapat diterapkan dalam perencanaan penataan ruang yang ada di provinsi, begitu juga perencanaan penataan ruang yang ada di provinsi harus dapat diterapkan dalam perencanaan penataan ruang di kabupaten/kota. Sehingga visi dan misi pembangunan Indonesia akan tercapai.

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul “Menata Wilayah Kehidupan” terbagi menjadi 2 sub tema atau unit bahasan, yaitu (1) Indonesia Masa Depan BangsaKu, yang memuat perencanaan tata ruang wilayah di Indonesia dan wilayah geografis pembangunan Indonesia; (2) Menata Indonesia Semakin Maju, yang memuat permasalahan penerapan tata ruang di Indonesia dan mengatasi permasalahan penerapan tata ruang di Indonesia.

Selain penjelasan mengenai materi, modul ini juga dilengkapi dengan tugas-tugas yang harus Anda kerjakan, baik secara perorangan maupun kelompok. Penugasan diberikan untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan keterampilan Anda. Penugasan merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang harus ditempuh dalam menuntaskan modul.

Modul ini disusun secara berurutan sesuai dengan urutan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Untuk itu, mempelajari modul ini sebaiknya.

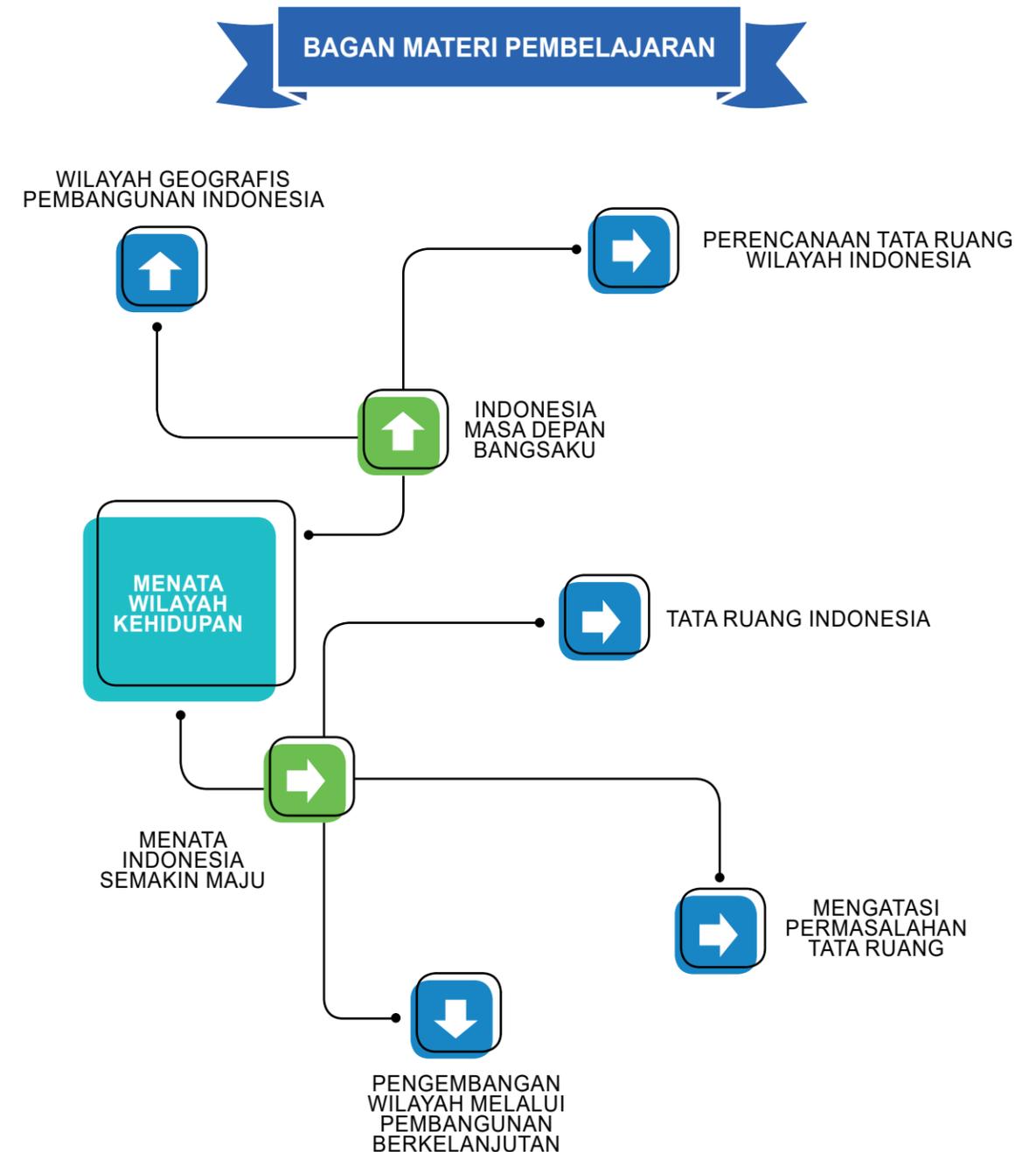
1. Membaca pengantar modul untuk mengetahui arah pengembangan modul
2. Membaca kompetensi dasar dan tujuan yang ingin dicapai melalui modul.
3. Mempelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Mempelajari Modul ini dapat dilakukan dengan cara belajar mandiri, berkelompok maupun bantuan Tutor.
5. Disarankan menggunakan berbagai referensi yang mendukung atau terkait dengan mataeri pembelajaran
6. Mengikuti semua tahapan yang ada pada modul
7. Pada Modul ini terdapat tugas mandiri/kelompok yang harus diselesaikan sebelum melanjutkan pembelajaran Modul berikutnya
8. Jika mampu menyelesaikan minimal 75% dari tugas dan soal, maka Anda dinyatakan TUNTAS dalam belajar pada modul ini.



Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul “Menata Wilayah Kehidupan” Anda mampu:

1. Memahami perencanaan tata ruang wilayah Indonesia.
2. Menjelaskan wilayah geografi pembangunan Indonesia.
3. Menjelaskan permasalahan dan solusi penerapan tata ruang di Indonesia.
4. Membuat bagan tata ruang berdasarkan potensi wilayah.



Pernahkah Anda mendengar adanya perbedaan harga kebutuhan pokok yang ada di luar Jawa dengan wilayah Ibu Kota Jakarta? Harga kebutuhan pokok apa saja yang berbeda? Bagaimana perbedaannya di berbagai daerah? Harga kebutuhan pokok yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, hingga Papua mengalami perbedaan. Mengapa bisa terjadi demikian?

Fenomena ini dapat terjadi karena adanya permasalahan mengenai tata ruang di Indonesia. Di daerah Sambas - Pontianak, Kalimantan Barat banyak menghasilkan buah jeruk, maka harga jeruk di daerah tersebut sangat murah. Tetapi ketika dipasarkan di Jawa harga jeruk tersebut menjadi mahal. Mengapa demikian? Faktor utama penyebab mahalnya harga jeruk dari Pontianak jika di jual di daerah lain adalah mahalnya biaya distribusi. Artinya, bila biaya distribusi sangat besar maka akan berpengaruh pada tingginya harga penjualan. Jadi, yang dibutuhkan agar harga jeruk Pontianak bisa murah ketika dijual di Jawa adalah menurunkan biaya distribusi semurah-murahnya.

Bukan hanya perbedaan harga barang. Cobalah Anda perhatikan, bagaimana kepadatan penduduk di setiap daerah? Pasti Anda akan mengatakan, Pulau Jawa paling padat, sedangkan pulau-pulau lain masih sangat sedikit penduduknya. Demikian pula pusat-pusat industri. Pulau Papua sangat jarang berdiri pabrik. Mengapa bisa terjadi demikian?

Permasalahan perbedaan harga, penyebaran penduduk, ataupun pusat industri yang ada di Indonesia dapat diatasi dengan cara melakukan penataan ruang secara tepat, sehingga potensi setiap daerah dapat di optimalkan untuk pembangunan. Demikian juga penekanan biaya produksi, termasuk biaya distribusi. Dengan penataan ruang yang baik, sarana prasarana yang lengkap dan modern, infrastruktur yang menunjang, maka akan memperkecil pengeluaran biaya.

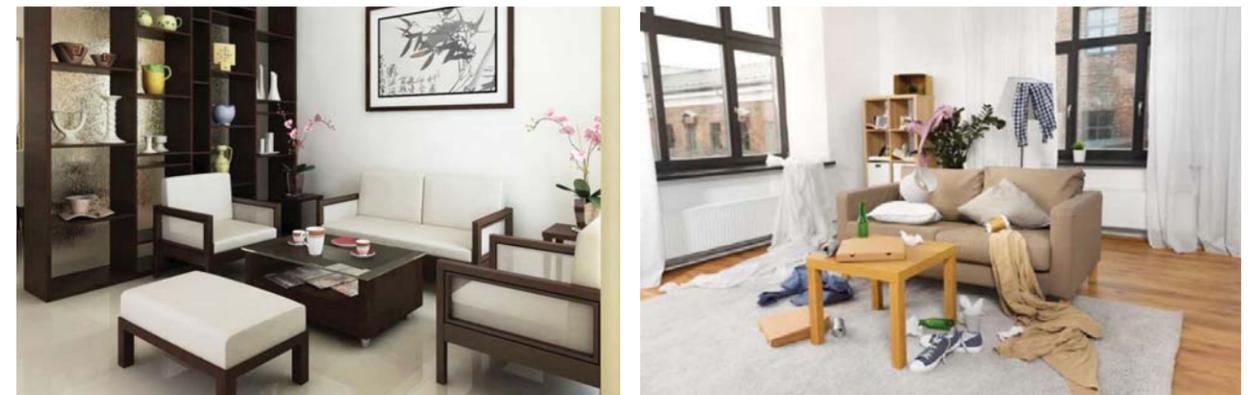
Indonesia mengalami penurunan (paceklik) produk perencanaan pembangunan. Sebut saja perencanaan pembangunan di Indonesia kurang terprogram. Dulu, pada masa orde baru, yang namanya rencana pembangunan merupakan rancangan pemerintah yang diatur dalam Ketetapan MPR yang tertuang dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam GBHN tersebut tertuang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek, yang biasa disebut dengan REPELITA. REPELITA adalah rencana pembangunan lima tahun, yang memuat arah pembangunan bangsa dalam kurun waktu selama lima tahun.

Masalah menurunnya rancangan pembangunan sebagai produk perencanaan pemerintah ini sudah mengalami degradasi sejak 30 tahun terakhir. Satu dekade diberlakukannya UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan

pembangunan infrastruktur dasar, saat ini menjadi terhambat karena adanya konflik ruang. Belum lagi masalah otonomi daerah yang menyebabkan kepala-kepala daerah seakan memiliki kekuasaan mutlak. Akibatnya proyek strategis tidak dapat dilaksanakan karena berbenturan dengan kepentingan daerah. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah agar terjadi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dapat menekan perbedaan antar wilayah di Indonesia.



A. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Indonesia



sumber: rumahoscarliving.com/www.msn.com

Gambar 1. Penataan ruang tamu



sumber: detik.com/www.medcom.id

Gambar 2. Penataan pemukiman penduduk

Coba Anda perhatikan gambar di atas! Sebuah perbedaan yang menyolok antara ruang yang ditata rapi dengan ruang yang tidak tertata. Demikian juga dengan wilayah pemukiman. Pengembangan perumahan yang direncanakan dengan baik akan memberikan kenyamanan, kerapian dan kemudahan gerakan penduduknya. Tetapi pemukiman yang tidak direncanakan, berkembang dengan sendirinya, bahkan tanpa ada ijin pendirian bangunan, termasuk munculnya bangunan-bangunan liar, maka akan berakibat buruk seperti banjir.

Demikian halnya dengan perencanaan tata ruang pada suatu negara. Untuk menghasilkan keseimbangan wilayah, keserasian tata ruang, kemudahan, kenyamanan dan keamanan, dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang dan berkesinambungan. Pada hakekatnya, membangun bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan hari ini, melainkan juga untuk masa yang akan datang.

Untuk memahami bagaimana perencanaan tata ruang di Indonesia, marilah kita pelajari bersama materi berikut ini.

1. Pengertian Perencanaan Tata Ruang di Indonesia

Pernahkah Anda menata ruang kelas? Bagaimana penataan ruang kelas yang baik agar terlihat serasi, menarik dan nyaman untuk belajar? Apakah ketika Anda menata ruang kelas, teman-teman Anda terlibat? Adakah guru/tutor pengajar yang ikut mengatur atau memerintah?

Nah, penataan ruang kelas adalah contoh dari penataan sebuah negara dalam kapasitas ruang yang kecil. Orang yang terlibat juga sedikit. Namun meskipun sedikit, tentu ada beberapa peserta didik atau bahkan pendidiknya yang seakan menjadi berkuasa dalam mengatur kelas tersebut. Demikian juga dalam sebuah negara. Semakin banyak orang, semakin banyak pula pendapat

dan keinginan.



sumber: monitor.co.id

Gambar 3. Pelanggaran di jalur Busway

Perhatikan gambar jalur busway yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta. Jalur tersebut mestinya untuk memperlancar kemacetan di Jakarta. Pembuatan jalur busway merupakan langkah maju dalam penataan ruang di Jakarta. Ini merupakan contoh dari sebuah penataan ruang dalam rangka memberikan kelancaran jalan.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tata ruang sebenarnya sudah ada sejak jaman dulu. Pada jaman kerajaan tata ruang sudah diatur oleh pemerintah kerajaan, dimana konsep tata ruangnya hampir sama, yaitu alun-alun



sumber: rajatourjogja.com

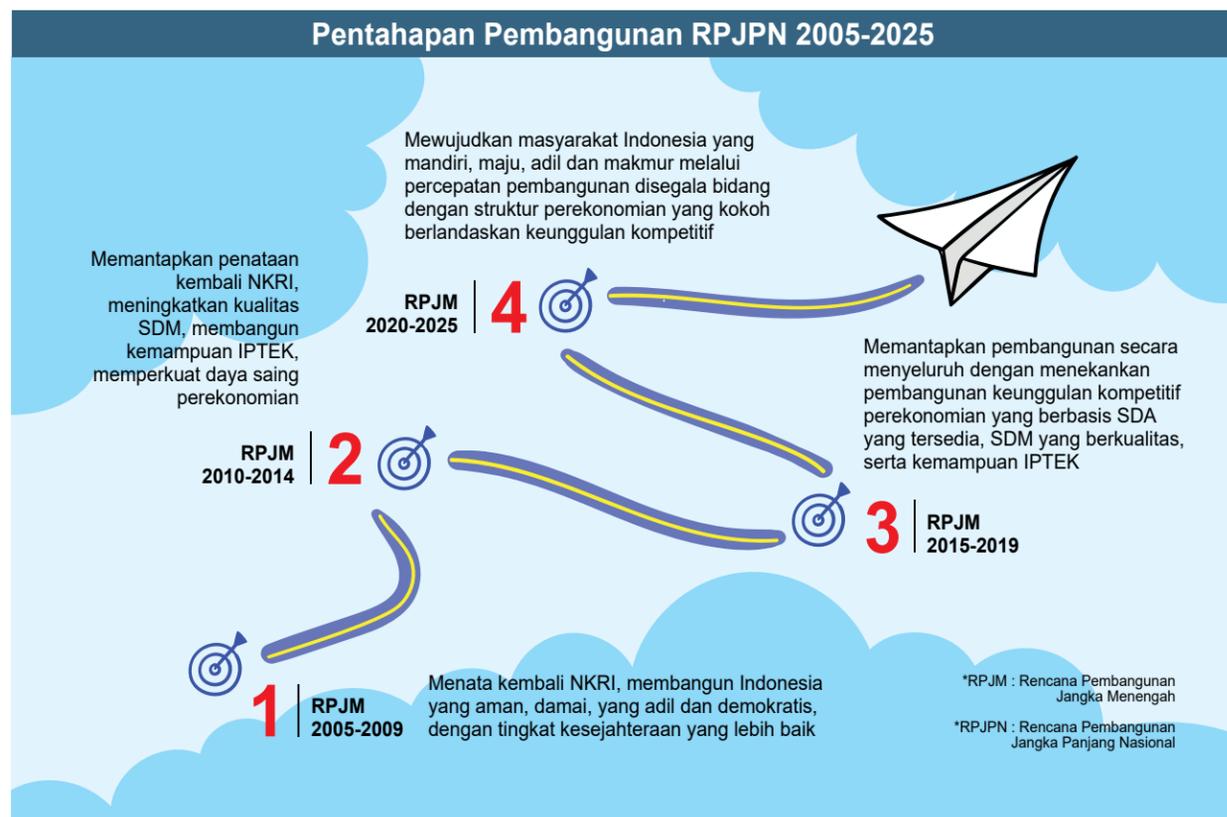
Gambar 4. Penataan ruang kerajaan jaman dulu

sebagai pusat yang dikelilingi keraton, tahanan, masjid dan pasar. Perencanaan tata ruang kerajaan semacam ini dilakukan untuk memudahkan komunikasi, pengawasan, keamanan dan pengaturan pemerintahan.

Jadi perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perencanaan tata ruang Indonesia memiliki tiga tingkatan, yaitu rencana tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Rencana tata ruang yang dibuat dalam tiga tingkatan oleh pemerintah Indonesia seharusnya sesuai dan saling mendukung antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, seperti dalam amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang tujuan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Perencanaan tata ruang mempunyai beberapa fungsi antara lain:

- Menghasilkan kualitas kehidupan dan penghidupan penduduk yang baik.
- Memenuhi tujuan efisiensi dan demokrasi melalui partisipasi masyarakat
- Memenuhi tantangan pembangunan berkelanjutan.
- Menganalisis kondisi wilayah saat ini dan menginterpretasikan perkembangan wilayah pada masa yang akan datang.



Gambar 5. Bagan rencana pentahapan pembangunan Indonesia 2005-2025

Perhatikan peta wilayah Indonesia!



sumber: symbianplanet.net

Gambar 6. Peta wilayah Indonesia

Wilayah Indonesia sangat luas hingga mencapai 1.905 juta km², terdiri dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, terdiri dari ribuan pulau, antar pulau dikelilingi lautan luas. Masing-masing kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya. Demikian juga setiap provinsi memegang otonomi daerah masing-masing. Bagaimana kewenangan pemerintah pusat jika setiap daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur wilayahnya? Guna menyelaraskan perencanaan tata ruang nasional, maka perlu ada sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

Untuk mengetahui bagaimana perencanaan tata ruang dalam tingkat wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, mari kita pelajari secara seksama penjelasan berikut.

1) Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional

Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional harus memperhatikan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Rencana Tata Ruang wilayah nasional (RTRWN) memuat beberapa hal berikut:

- a) Tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah nasional..
- b) Rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanan dan sistem jaringan prasarana utama.
- c) Rencana pola ruang wilayah nasional, meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional

- e. Menentukan tujuan, sasaran, dan langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah.
- f. Perhatikan bagan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pentahapan pembangunan Indonesia tahun 2005-2017, yang disusun Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- g. Kebijakan terkait perencanaan tata ruang tertuang dalam RPJPN 2005-2025, seperti yang tertuang pada gambar di atas, menyebutkan bahwa visi pembangunan kita adalah terwujudnya "Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur". Melalui RPJM 1, RPJM 2, RPJM 3, hingga RPJM 4, pemerintah ingin mewujudkan visi tersebut. Tantangannya adalah sanggupkah kita mencapai visi tersebut?
- h. Produk perencanaan tata ruang di Indonesia berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi antara lain sebagai acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan wilayah di Indonesia dilakukan dengan mengidentifikasi target pembangunan dan permasalahan yang dihadapi secara jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

- d) Penetapan kawasan strategis nasional.
- e) Arahan pemanfaatan ruang yang berisi tentang indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
- f) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional berisi tentang indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.



sumber: www.skyscrapercity.com

Gambar 7. Rencana ibukota negara yang baru

Rencana pembangunan ibu kota baru merupakan contoh RTRW nasional. Rencana ini disusun untuk kebutuhan nasional yang harus mempertimbangkan kepentingan bersama. Meskipun akan dibangun di Kalimantan tetap memperhatikan cakupan nasional.

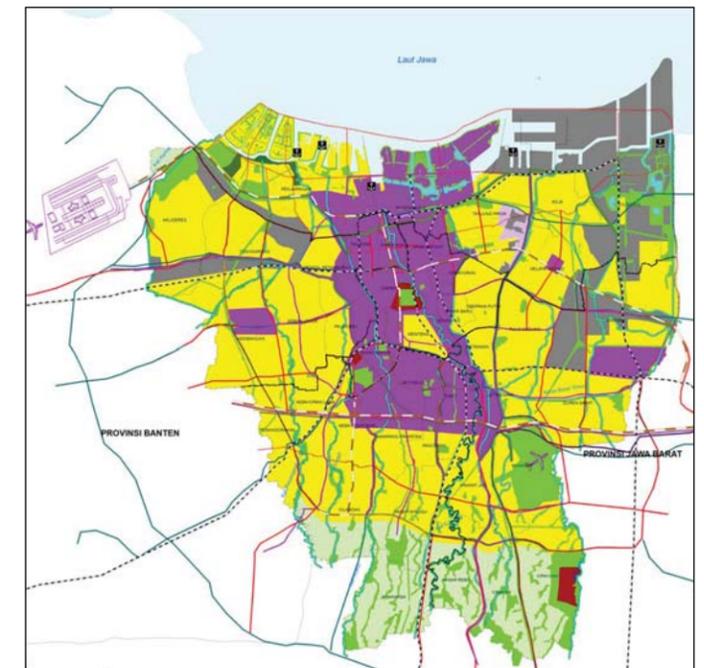
Penyusunan RTRW nasional ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemanfaatan ruang dan pengendaliannya di wilayah nasional, serta dapat mewujudkan keterpaduan perkembangan antar wilayah propinsi.

2) Perencanaan Tata Ruang Wilayah Propinsi

Rencana tata ruang wilayah provinsi merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah nasional. Dalam penyusunan RTRWP harus mengacu pada RTRWN dan berpedoman pada rencana jangka panjang pembangunan suatu daerah.

Setiap provinsi di Indonesia harus dapat membuat perencanaan tata ruang untuk wilayahnya. Perencanaan tata ruang provinsi mengacu pada RTRW nasional, sehingga perencanaan tata ruang wilayah nasional menjadi dasar penyusunan perencanaan tata ruang provinsi. RTRW provinsi memuat beberapa hal berikut:

- a) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi
- b) Rencana struktur ruang wilayah provinsi, yang meliputi sistem perkotaan berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanan dan sistem jaringan prasarana
- c) Rencana tata ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis.
- d) Penetapan kawasan strategis provinsi.
- e) Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi program utama jangka menengah lima tahunan.
- f) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

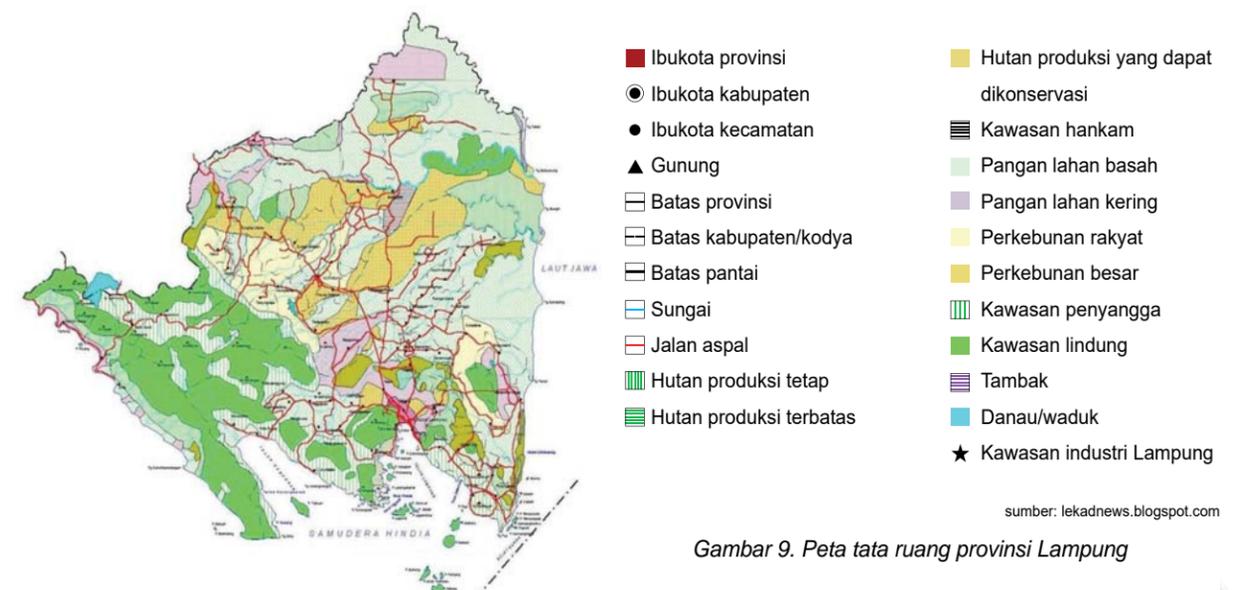


- | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ■ Kawasan berfungsi lindung | ■ Kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa taman |
| ■ Kawasan terbuka hijau berbudidaya | ■ Kawasan pertanian |
| ■ Kawasan fungsi ibukota negara | ■ Kawasan perikanan |
| ■ Kawasan permukiman | ■ Kawasan industri dan pergudangan |
| ■ Kawasan permukiman taman | ■ Kawasan terbuka non hijau |
| ■ Kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa | |

sumber: nurwantoblogs.blogspot.com

Gambar 8. Peta rencana pola ruang daratan provinsi DKI Jakarta

Perhatikan peta pemerintah Provinsi Lampung di bawah ini!



- | | |
|---------------------------|------------------------------------------|
| ■ Ibukota provinsi | ■ Hutan produksi yang dapat dikonservasi |
| ● Ibukota kabupaten | ■ Kawasan hankam |
| ● Ibukota kecamatan | ■ Pangan lahan basah |
| ▲ Gunung | ■ Pangan lahan kering |
| □ Batas provinsi | ■ Perkebunan rakyat |
| □ Batas kabupaten/kodya | ■ Perkebunan besar |
| □ Batas pantai | ■ Kawasan penyangga |
| □ Sungai | ■ Kawasan lindung |
| □ Jalan aspal | ■ Tambak |
| ■ Hutan produksi tetap | ■ Danau/waduk |
| ■ Hutan produksi terbatas | ★ Kawasan industri Lampung |

sumber: lekadnews.blogspot.com

Gambar 9. Peta tata ruang provinsi Lampung

Karena wilayah provinsi merupakan kesatuan dari wilayah kabupaten/kota, maka dalam penyusunan perencanaan RTRWP harus memerhatikan potensi dan kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. Sehingga RTRWP yang disusun oleh pemerintah provinsi akan selaras dan sesuai RTRWK yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota. Seperti contoh pada gambar RTRW Provinsi Lampung, penyusunan RTRWP merupakan gambaran umum RTRW yang nantinya dijabarkan secara rinci dalam RTRWK.

3) Perencanaan Tata Ruang Kabupaten/Kota

Penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota merupakan alat untuk mengatur, mengendalikan dan mengarahkan ruang di wilayah kabupaten/kota. Penyusunan perencanaan tata ruang kabupaten/kota harus mengacu pada RTRW Provinsi. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan landasan pengembangan otonomi daerah, maka perencanaan tata ruang kabupaten/ kota dikelola oleh pemerintah setempat untuk kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan adanya undang-undang ini maka peran pemerintah daerah sangat luas dalam mengatur daerahnya sendiri. Namun demikian pembangunan daerah melalui perencanaan tata ruang kabupaten/kota (RTRWK) tetap dalam rangka mensukseskan pembangunan wilayah provinsi dan nasional.

Penyusunan RTRW kabupaten/kota mengacu pada beberapa hal berikut:

- RTRW Nasional dan RTRW propinsi.
- Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Perhatikan gambar berikut!



sumber: rappler.com

Gambar 10. Banjir di Kabupaten Bandung

Kawasan Bandung Jawa Barat, merupakan daerah dataran tinggi. Tetapi tiga tahun terakhir ini, setiap hujan datang bisa dipastikan daerah tersebut selalu banjir. Mengapa bisa terjadi?

Jika kita melihat bencana banjir setiap musim penghujan tiba, menurut Anda apa yang semestinya jadi prioritas utama dalam menyusun rancangan RTRW di tingkat kabupaten/kota?

Penyusunan RTRW kabupaten/kota harus memperhatikan permasalahan yang ada pada wilayah kabupaten kota tersebut. Disamping itu harus diperhatikan pula daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah kabupaten/kota tersebut. Jangka waktu pelaksanaan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota adalah 20 tahun.

RTRW kabupaten/kota menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pengendalian pemanfaatan ruang, dan penataan ruang kawasan strategis di wilayah kabupaten/kota. Pada perencanaan wilayah kota ada beberapa tambahan yang harus diperhatikan yaitu penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), ruang terbuka non hijau, sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta ruang evakuasi bencana. Fasilitas dan infrastruktur itu dibutuhkan untuk menjalankan fungsi kota yaitu sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan.

B. Wilayah Geografis Pembangunan

Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang sampai Merauke terbentang jarak lebih dari 8.500 km. Jika kita bayangkan maka betapa luasnya wilayah tersebut. Negara kita berupa kepulauan. Pulau satu dengan yang lainnya di hubungkan oleh lautan.

Berdasarkan letak geografis tersebut, maka pembangunan di Indonesia yang seharusnya diterapkan adalah pembangunan yang mengintegrasikan pusat pertumbuhan melalui perwilayahan, dengan mengutamakan kekuatan maritim.

Coba sekarang kita merefleksi diri sebagai warga negara yang memiliki laut begitu luas, apakah Anda bisa berenang? Apakah Anda pernah berenang di pantai? Apakah Anda pernah berkeliling menyusuri pantai? Seberapa jauh Anda mengelilingi pulau tempat tinggal Anda? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah bukti dari seberapa jauh Anda mengenal NKRI.

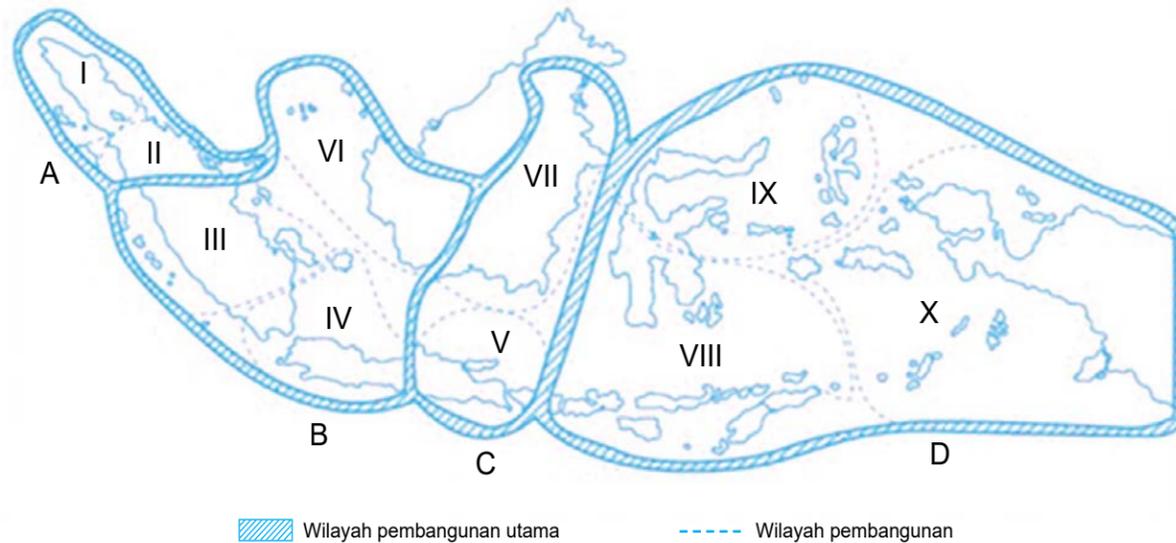


sumber: sakticargo.com

Gambar 11. Tol laut sebagai penghubung geografis

Pembangunan Indonesia yang mengintegrasikan pusat pertumbuhan melalui perwilayahan diharapkan dapat berjalan dengan seimbang melalui pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan ini diperlukan karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan khas sehingga membutuhkan perencanaan tata ruang pembangunan di tingkat regional.

Perencanaan tata ruang di Indonesia harus memperhatikan wilayah pusat pertumbuhan. Bappenas membagi wilayah di Indonesia menjadi 4 (empat) pusat pertumbuhan yaitu wilayah A, B, C dan D. masing-masing wilayah dibagi menjadi beberapa wilayah pembangunan. Perhatikan peta wilayah pembangunan Indonesia di bawah ini!



sumber: geograpik.blogspot.com

Gambar 12. Peta wilayah pusat pembangunan di Indonesia

Berdasarkan peta di atas dapat dijelaskan persebaran wilayah pembangunan utama, kota pusat pertumbuhan, pembagian wilayah utama, provinsi yang menjadi pembagian wilayah utama serta pusat dari pembangunan wilayah utama seperti pada tabel di bawah ini.

Wilayah Pembangunan Utama	Kota Pusat Pertumbuhan	Pembagian Wilayah Utama	Provinsi	Pusat
A	Medan	I	Aceh dan Sumatera Utara	Medan
		II	Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau	Pekanbaru
B	Jakarta	III	Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung	Palembang
		IV	Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	DKI Jakarta
		V	Kalimantan Barat	Pontianak

C	Surabaya	VI	Jawa Timur dan Bali	Surabaya
		VII	Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara	Samarinda dan Balikpapan
D	Makassar	VIII	Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara	Makassar
		IX	Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sulawesi Utara	Manado
		X	Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat	Sorong

Arahan pembangunan Indonesia saat ini menggunakan pendekatan sektoral dan regional berdasarkan potensi unggulan di tiap-tiap wilayah. Interaksi antara pusat-pusat pertumbuhan dikuatkan dengan adanya perbaikan jaringan infrastruktur. Penguatan pusat-pusat pertumbuhan dan konektivitas antar pusat pertumbuhan merupakan dasar pembentukan Koridor Ekonomi Indonesia (KEI).

Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) adalah jaringan infrastruktur terintegrasi di sebuah kawasan geografi yang dirancang untuk menstimulasikan pengembangan ekonomi satu kawasan. Kawasan KEI dibangun dalam rangka memberi penguatan pada satu kawasan wilayah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan perdagangan yang dimiliki.

Pembangunan wilayah di Indonesia dapat dilakukan secara kompetitif dan berkelanjutan dengan pembangunan koridor ekonomi Indonesia. Salah satu manfaat KEI yaitu terciptanya peningkatan produktivitas sumber daya alam secara berkelanjutan. Wilayah yang dikelola sesuai dengan potensi fisik dan sosialnyakan lebih maksimal dalam pencapaian tujuan pembangunan. Anda dapat mengamati peta KEI di bawah ini!



sumber: slideplayer.info

Gambar 13. Peta 6 koridor ekonomi Indonesia prioritas

Untuk mencapai perubahan yang positif dan pengembangan wilayah dalam koridor ekonomi Indonesia, yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi adalah;

- a. KEI tidak diarahkan pada kegiatan eksploitasi dan ekspor sumber daya alam, namun lebih pada kegiatan penciptaan nilai tambah.
- b. KEI tidak diarahkan untuk menciptakan ekonomi pada daerah tertentu namun lebih pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif.
- c. KEI tidak menekankan pembangunan ekonomi yang dikendalikan oleh pusat, namun lebih ditekankan pada upaya sinergi pembangunan sektoral dan wilayah untuk meningkatkan keuntungan komparatif dan kompetitif secara nasional dan global.
- d. KEI tidak menekankan pembangunan transportasi darat saja, namun pada pembangunan transportasi yang seimbang antara darat, laut, dan udara.
- e. KEI tidak menekankan pada pembangunan infrastruktur yang mengandalkan anggaran pemerintah semata, namun juga pembangunan infrastruktur yang menekankan kerja sama pemerintah dengan swasta.

PENUGASAN 1

- a. Bacalah modul, buku referensi, majalah, serta berbagai media, carilah informasi tentang wilayah dan perwilayahan serta tata ruang.
- b. Buatlah catatan secara ringkas pada buku catatan pribadi untuk dipahami dan dilaporkan dalam pembelajaran tutorial, tentang:
 - 1) Perencanaan tata ruang wilayah Indonesia
 - 2) Wilayah geografis pembangunan
- c. Carilah informasi lain dari berbagai sumber terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah Indonesia dan wilayah geografis pembangunan Indonesia, untuk dipelajari sebagai bahan pengayaan, catat data/informasi yang Anda peroleh untuk didiskusikan bersama.

KEGIATAN TUTORIAL 1

Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil (misal: 1 kelompok terdiri dari 5 orang), berdiskusi bersama teman satu kelompok, kemudian peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi kelompok dan mengomunikasikan hasil diskusi dipandu oleh tutor, terkait tentang :

- a. Perencanaan tata ruang wilayah Indonesia
- b. Wilayah geografis pembangunan

LATIHAN

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E.

1. Perencanaan tata ruang memegang peranan penting dalam proses penataan ruang. Berhasil atau tidaknya penataan ruang tergantung pada perencanaan tata ruang tersebut karena tata ruang adalah ...
 - A. Wujud struktur ruang dan pola ruang
 - B. Sistem managerial ruang
 - C. Wujud sosial ruang
 - D. Bentuk peta wilayah
 - E. Bentuk penggunaan lahan
2. Undang-undang yang mengatur tentang penataan ruang di Indonesia adalah ...
 - A. Undang-Undang No 24 tahun 2007
 - B. Undang-Undang No 25 tahun 2007
 - C. Undang-Undang No 26 tahun 2007
 - D. Undang-Undang No 27 tahun 2007
 - E. Undang-Undang No 28 tahun 2007
3. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terhambat akan berdampak pada ...
 - A. Fungsi lahan kurang produktif kurang maksimum
 - B. Kebutuhan lahan untuk tata ruang terbatas
 - C. Penanaman modal dari luar negeri ke daerah sangat rendah
 - D. Tingkat eksplorasi daerah terhadap sumber daya alam rendah
 - E. Pembangunan pemukiman secara liar semakin meningkat.
4. Perencanaan tata ruang memiliki beberapa fungsi seperti dibawah ini kecuali ...
 - A. Menghasilkan kualitas kehidupan dan penghidupan penduduk yang baik
 - B. Memenuhi tujuan efisiensi dan demokrasi melalui partisipasi.
 - C. Memenuhi tantangan pembangunan berkelanjutan.
 - D. Menganalisis wilayah saat ini dan menginterpretasikan perkembangan wilayah pada masa datang.
 - E. Mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

5. Kepadatan penduduk di daerah perkotaan semakin meningkat seiring dengan arus urbanisasi yang besar. Kebutuhan akan tempat tinggal pun semakin meningkat. Akan tetapi pembangunan rumah sering mendapatkan kendala terkait pemanfaatan ruang yang dianggap tidak sesuai. Contohnya pembangunan rumah di sekitar hutan lindung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang perlu dilakukan adalah ...

- A. Menyediakan alternatif rumah susun di daerah padat penduduk.
- B. Membatalkan program pembangunan rumah di daerah potensial.
- C. Mengurangi jumlah pembangunan rumah dalam proyek program pembangunan rumah.
- D. Membuat peraturan rtrw yang baru dengan mengubah isi yang ada didalamnya.
- E. Melakukan penyesuaian rtrw sesuai rencana pembangunan perumahan

6. Perhatikan pernyataan berikut ini!

- 1) Arahan zonasi sistem nasional
- 2) Arahan perijinan
- 3) Arahan insentif dan disinsentif
- 4) Arahan biaya
- 5) Arahan sanksi

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Nasional ditunjukkan oleh angka ...

- A. 1, 3 dan 4
- B. 1, 2 dan 3
- C. 2, 3 dan 4
- D. 3, 4 dan 5
- E. 1, 4 dan 5

7. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi keharusan dalam perencanaan tata ruang kota. Fungsi utama tata ruang tersebut adalah ...

- A. Meningkatkan minat pengunjung untuk berwisata
- B. Menghiasi lingkungan melalui taman-taman kota
- C. Memusatkan kawasan perkantoran dan pemerintahan
- D. Menyediakan ruang sebagai lokasi perdagangan
- E. Mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan

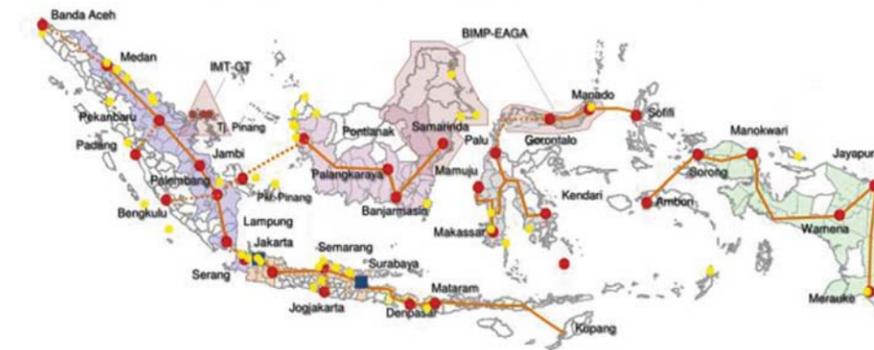
8. Wilayah pembanguna utama A pusat pertumbuhan berada di kota ...

- A. Makassar
- B. Jakarta
- C. Surabaya
- D. Medan
- E. Jayapura

9. Pusat Pertumbuhan di Kota Makassar dengan pembagian wilayah IX meliputi Propinsi ...

- A. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan
- B. Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Gorontalo
- C. Maluku, Maluku Utara, dan Papua
- D. Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengan
- E. Gorontalo dan Maluku

10. Perhatikan Peta berikut ini!



Berdasarkan peta di samping, Provinsi Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda dan Pontianak termasuk koridor ...

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

B. Uraian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

- 1. Jelaskan hubungan antara perencanaan tata ruang dengan kerusakan lingkungan yang berakibat pada bencana alam seperti banjir!
- 2. Perencanaan tata ruang memiliki beberapa fungsi. Sebutkan 5 fungsi perencanaan tata ruang!
- 3. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan berkembangnya kearifan lokal di setiap daerah. Apakah kearifan lokal perlu di padukan dengan tata ruang wilayah? Jelaskan!
- 4. Sebutkan manfaat perencanaan tata ruang wilayah!
- 5. Sebutkan provinsi pembagian wilayah utama VII dengan kota pusat pertumbuhan Surabaya!



sumber: www.kompas.tv

Gambar 14. Banjir di Provinsi Bengkulu pada 2019 lalu.

Pernahkan Anda memerhatikan berita di media sosial, ketika musim hujan datang banyak kota di Indonesia mengalami banjir, seperti misalnya; Jakarta, Bandung, Medan? Masih banyak daerah yang kebanjiran. Tidak hanya kota besar, bahkan di Wasior Papua saja, daerah yang jauh dari hiruk pikuk keramaian, mengalami banjir bandang dan menelan banyak korban.

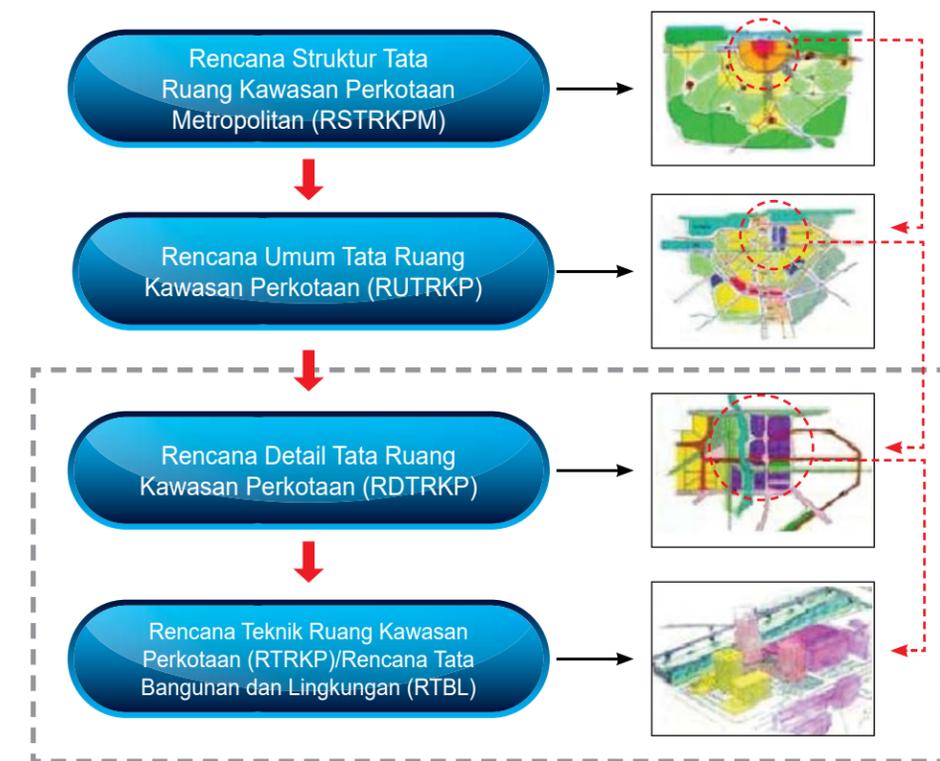
Kota Bandung yang terletak di dataran tinggi saja bisa banjir, apalagi Jakarta yang terletak pada dataran rendah pantai. Pernahkah Anda berpikir, mengapa permasalahan banjir yang setiap tahun datang tidak bisa ditangani? Apa hanya karena alasan curah hujan yang turun mengakibatkan banjir begitu saja? Apakah manusia tidak bisa mengatasi banjir?

Sekarang perhatikan diri Anda dan lingkungan. Jika Anda terkena banjir, apa yang akan dipermasalahkan pertama kali? Tentu Anda akan mencari penyebab terjadinya banjir. Jika penyebab itu sudah ketemu, maka penyelesaian masalah banjir adalah menangani penyebab tersebut. Jika daerah Anda lebih rendah dari sungai, apakah Anda akan mencari tempat yang rendah ataukah yang lebih tinggi?

Banjir yang terjadi di kota-kota besar tersebut lebih banyak disebabkan oleh permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan di sebabkan berbagai faktor, diantaranya adalah penerapan tata ruang yang kurang baik. Jika demikian, siapa yang harus disalahkan? Mengatur tata ruang memang tidak gampang. Harus melibatkan berbagai pihak dan kepentingan. Tetapi satu hal yang harus disepakati adalah bahwa tata ruang bukan sekedar pemenuhan kebutuhan hari ini, melainkan harus bermanfaat dalam jangka panjang. Jadi, tata ruang yang baik adalah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.



A. Tata Ruang Di Indonesia



sumber: kimpraswil

Gambar 15. Rencana struktur tata ruang perkotaan

Coba Anda perhatikan gambar rencana tata ruang di atas. Untuk membangun sebuah kota, mestinya diawali dengan perencanaan seperti pada gambar tersebut. Mulai dari rencana struktur tata ruang secara keseluruhan, kemudian pembuatan rencana umum, setelah itu membuat detail tata ruangnya, dan yang terakhir adalah pembuatan rencana teknik. Perlu Anda ketahui, pada masing-masing tahap mestinya harus melalui tahap uji publik, yaitu menyampaikan rencana tata ruang kepada masyarakat, apakah masih perlu pembenahan atau sudah memenuhi persyaratan. Jika sudah tidak menemui masalah baru dilanjutkan untuk tahapan penyusunan tata ruang

selanjutnya. Jadi, untuk menyusun sebuah rencana tata ruang dibutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak serta merta langsung membangun tanpa adanya perencanaan.

Upaya mewujudkan pembangunan secara merata di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai strategi pembangunan. Perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia sudah di atur sedemikian rupa melalui undang-undang, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak ditemui berbagai macam hambatan. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) menyebabkan ketimpangan kondisi kesejahteraan masyarakat. Hambatan tersebut salah satunya disebabkan lemahnya koordinasi antar daerah dalam mengelola wilayah secara terpadu.

Dalam menyusun tata ruang untuk skala nasional, tidak terlepas dari usulan tata ruang yang dirancang oleh pemerintah daerah. Sehingga tata ruang nasional merupakan cakupan keseluruhan pembangunan wilayah Indonesia. Perlu diperhatikan dalam perencanaan tata ruang adalah kegunaan dan kebermanfaatannya dari tata ruang tersebut dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini perencanaan tata ruang harus berpedoman pada kelestarian lingkungan. Sehingga, dengan adanya pembangunan akan memberikan kemudahan dalam jangka panjang. Bukan sebaliknya, membangun justru merusak lingkungan, apalagi bangunan tersebut tidak memiliki manfaat dan merugikan rakyat. Akibatnya, banyak bangunan mangkrak yang tidak terselesaikan. Jika demikian siapa yang dirugikan?

Demikian juga dengan kondisi daerah yang berbeda-beda. Potensi sumber daya alam yang berbeda, keadaan sosio-kultur masyarakat yang beraneka ragam. Tentu tata ruang tidak bisa disamakan antara daerah yang satu dengan lainnya.

Perhatikan gambar perbedaan geografis dari berbagai daerah di Indonesia!



sumber: ndorokakungmu.files.wordpress.com/www.soldomi.id

Gambar 16. Perbedaan geografis antar wilayah yang menyolok Kalimantan berupa rawa-rawa (kiri) dan Sulawesi berupa perbukitan (kanan)

Menyadari betapa uniknya wilayah Indonesia, tentu kita akan mengatakan bahwa untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang dalam rangka menyejahterakan rakyat adalah hal yang tidak mudah. Seperti yang terlihat pada gambar di atas, Anda tentu akan mengatakan kebutuhan rencana tata ruang antara di Kalimantan Utara dengan Sulawesi berbeda. Sebagai contoh, jenis transportasi yang perlu dikembangkan saja berbeda. Itu baru dua daerah, belum daerah-daerah lain yang masih tersebar luas.

Pernahkah Anda mendengar harga BBM di kota yang satu dengan kota lainnya berbeda? Atau harga semen bangunan yang lebih mahal dari harga emas? Ini semua bisa terjadi karena kondisi geografis di Indonesia yang sangat variatif. Oleh sebab itu, pembangunan di Indonesia tidak bisa disama-ratakan antara daerah satu dengan yang lain. Data yang valid tentang keadaan suatu wilayah sangat dibutuhkan dalam penyusunan rancangan tata ruang yang benar dan baik.

Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan lima hal, yaitu; 1) sistem, 2) fungsi utama kawasan, 3) wilayah administratif, 4) kegi-atan kawasan, dan 5) nilai strategis kawasan.

Pada nilai strategis kawasan, penataan kawasan dikategorikan dalam strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan UU 26/2007, kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Sehingga pada kawasan yang memiliki nilai strategis nasional pengelolaan tata ruangnya dilakukan oleh pemerintah pusat, karena kawasan ini merupakan wilayah kepentingan nasional. Sebagai contoh adalah pembangunan pangkalan TNI di pulau terluar untuk keamanan negara.

Rencana tata ruang memuat struktur dan pola ruang. Struktur ruang merupakan rencana sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Sedangkan Pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Perencanaan tata ruang Indonesia memiliki tiga tingkatan, yaitu rencana tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten. Rencana tata ruang yang dibuat oleh tiga tingkatan pemerintah Indonesia seharusnya sesuai satu sama lain. Pemerintah pusat mengembangkan rencana nasional tata ruang (RTRWN) pertama, yang mendeliniasi daerah lindung untuk kawasan lindung dan budidaya untuk pembangunan. Rencana tata ruang nasional dirancang untuk jangka panjang, yaitu jangka waktu 25-50 tahun.

Rencana tata ruang provinsi (RTRWP) dikembangkan berdasarkan rencana tata ruang nasional. Rencana tata ruang provinsi dikembangkan untuk jangka waktu 15 tahun. Dari RTRWP rencana tata ruang kabupaten/kota (RTRWK) dikembangkan, dirancang untuk menjadi rencana jangka pendek, yaitu jangka waktu 5 tahun.

Rencana tata ruang semua tingkatan pemerintah direvisi setiap 5 tahun. Rencana tata ruang biasanya direvisi untuk menyesuaikan fungsi daerah sesuai dengan kondisi fisiknya. Struktur sistem perencanaan tata ruang yang mengalokasikan sejumlah besar otoritas pengambilan keputusan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi perencanaan tata ruang di daerahnya, termasuk otorisasi tingkat kabupaten/kota untuk mengalokasikan izin untuk kegiatan pemanfaatan lahan.

Untuk melaksanakan rencana tata ruang, diperlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) seperti dalam amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, yang berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi sudah sesuai dalam setiap rencana tata ruang pemerintah. Jika rencana tata ruang belum dilakukan kajian melalui KLHS, maka tidak boleh ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. Artinya rencana tata ruang tersebut belum bisa dilaksanakan.

Selain itu, hambatan lain yang dihadapi dalam penerapan perencanaan tata ruang di Indonesia adalah:

1. Pemanfaatan dan pengendalian ruang belum efektif

Permasalahan perencanaan tata ruang di setiap daerah masih belum dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai bentuk perencanaan tata ruang seperti rencana zonasi masih dalam proses pembuatan di daerah perencanaan. Akibatnya proses penataan ruang selanjutnya, yaitu pemanfaatan dan pengendalian tata ruang mengalami hambatan. Sebagai contoh, banyak lahan pertanian subur yang dibangun perumahan, sementara lahan tandus yang gersang dibiarkan begitu saja.

2. Lembaga penyelenggara penataan ruang belum efektif

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam penyelenggaraan perencanaan tata ruang, baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Kualitas sumber daya manusia yang handal akan mempercepat penataan ruang yang efektif. Tapi sebaliknya kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menghambat penataan ruang.

Koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah sangat diperlukan dalam penataan ruang, untuk menyinkronkan antara potensi yang dimiliki, kebutuhan wilayah serta keberlanjutan di masa yang akan datang. Lembaga-lembaga



Gambar 17. Bappenas yang berfungsi sebagai penyusun tata ruang

sumber: realitarakyat.com

pemerintah yang terlibat, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan, merupakan penentu kebijakan arah perencanaan tata ruang.

3. Sistem informasi penunjang pembangunan belum optimal

Penataan ruang yang ada di wilayah Indonesia harus menyeluruh dimulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Agar bisa melaksanakan sampai tahap pengendalian pemanfaatan ruang di butuhkan sistem informasi yang menunjang pembangunan. Namun sistem informasi penunjang belum tersedia secara optimal, sehingga monitoring dan evaluasi penataan ruang masih terhambat.



sumber: citrasatelit.net

Gambar 18. Citra satelit yang belum dimanfaatkan

Sekarang ini kita sudah berada pada era digital yang serba cepat. Dibutuhkan sumber daya manusia yang cerdas dan visioner dalam menghadapi persaingan global. Salah satu contoh adalah interpretasi foto udara atau citra satelit, yang memaparkan kekayaan alam wilayah Indonesia, seperti terlihat dalam gambar. Jika kita tidak punya tenaga ahli (SDM) yang dengan cepat sanggup menginterpretasikan gambar tersebut, maka potensi bangsa kita akan diambil oleh orang lain.

Apakah Anda rela kekayaan bangsa kita dikuasai oleh bangsa lain? Sudah banyak contoh yang terjadi, pengambilan kekayaan sumber alam kita yang dilakukan bangsa lain, seperti pencurian ikan yang dilakukan kapal-kapal asing. Hal itu terjadi karena kita tidak tahu dengan kekayaan yang dimiliki. Jika sudah dicuri orang, kita ribut dan marah-marah.

Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya suatu sistem informasi yang baik dan benar serta akurat, untuk penyusunan rencana penataan ruang. Sehingga ketika kita tahu tempat-tempat sumber daya alam strategis, maka secara langsung akan disusun rencana tata ruang untuk melindungi kekayaan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab, terutama bangsa asing yang akan mencuri kekayaan kita.

4. Potensi konflik pemanfaatan ruang masih tinggi

Penataan ruang di beberapa daerah di Indonesia masih rawan konflik. Hal ini terjadi karena belum adanya tata batas kawasan secara detail. Contohnya, hutan lindung banyak digunakan masyarakat untuk pemukiman, akibatnya ketika hujan lebat banjir dan tanah longsor datang menerjang.



sumber: harianjogja.com

Gambar 19. Demo penolakan pembangunan pabrik semen di Rembang

Beberapa wilayah di Indonesia mengalami konflik pemanfaatan ruang yang belum terselesaikan dengan baik, contohnya reklamasi di pantai Jakarta. Ini masih menjadi konflik antara pengembang proyek (reklamator), pemerintah daerah, dan rakyat. Konflik yang belum selesai inilah yang menghambat penerapan tata ruang wilayah.

Contoh lain yang juga belum terselesaikan adalah pendirian pabrik semen di Rembang Jawa Tengah. Penolakan berdirinya pabrik semen memunculkan aksi demonstrasi yang berujung pada kematian. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Untuk mengantisipasi terjadinya konflik antara pemerintah dan rakyat, dalam perencanaan sebuah tata ruang hendaknya melibatkan semua kepentingan, termasuk rakyat.

5. Adanya kesenjangan antar wilayah di Indonesia

Hambatan yang lain dari penerapan tata ruang di Indonesia yaitu adanya kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Kesenjangan ini terlihat dari pembangunan infrastruktur yang terpusat pada wilayah kota-kota besar dan belum menyentuh daerah-daerah pedalaman. Hal ini terjadi karena pimpinan daerah kurang terbuka untuk mengembangkan wilayahnya. Bahkan ada kepala daerah yang tidak bersedia wilayahnya dikelola oleh orang lain yang bukan putra daerah. Kepala daerah tidak bersedia memberikan data potensi wilayah, takut sumber daya alamnya diambil orang lain. Bahkan ada pula kepala daerah yang tidak setuju di wilayahnya didirikan pabrik. Akibatnya, wilayah tersebut tidak masuk dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional. Wilayah yang demikian akan tertinggal pembangunannya.

Seperti contoh yang terlihat pada gambar, pembangunan seakan hanya ada di Jakarta. Jalan layang sampai tingkat tiga, kendaraan masih macet. Tetapi di Papua, seakan belum tersentuh pembangunan. Ini merupakan masalah pemerataan pembangunan yang sangat serius. Dengan terjadinya sentralisasi pembangunan seperti ini mengakibatkan penduduk akan memusat ke daerah dengan pembangunan yang besar karena daya tariknya lebih kuat. Sedangkan daerah yang belum berkembang pembangunannya, akan kehabisan penduduk karena pergi meninggalkan wilayahnya menuju daerah yang makmur. Jika pemerintah tidak segera menyeimbangkan penataan ruang di daerah-daerah seluruh wilayah Indonesia, maka yang akan terjadi adalah adanya kesenjangan antar daerah dalam segala hal, baik jumlah populasi maupun kemakmuran rakyat.



sumber: youtube.com/www.indonesia.go.id

Gambar 20. Kesenjangan pembangunan antar daerah

6. Adanya disparitas ekonomi antar wilayah di Indonesia

Mengapa orang-orang dari berbagai daerah/pelosok berbondong-bondong datang ke Jakarta? Alasannya sederhana, mencari uang. Kalau sekedar mencari uang, mengapa harus ke Jakarta?

Jika Anda disuruh mencangkul di sawah, sehari dibayar Rp 50.000,- dan disuruh kerja di pabrik selama delapan jam dibayar Rp 100.000,-, Anda akan memilih yang mana? Tentu Anda akan mengatakan, kerja di sawah kotor, kepanasan dan capai, kalau kerja di pabrik tidak kotor, tempatnya bersih, tidak panas dan santai, bayarannya pun lebih besar. Tentu siapapun orangnya akan memilih kerja di pabrik.

Besarnya penghasilan (UMR), kemudahan mencari kerja, kemudahan memenuhi kebutuhan hidup, serta kemudahan-kemudahan yang lain adalah daya tarik suatu wilayah kepada masyarakatnya. Perbedaan ekonomi yang menyolok ini terjadi karena perencanaan tata ruang yang kurang seimbang.

B. Mengatasi Permasalahan Tata Ruang

Kita telah mengetahui permasalahan dan hambatan penerapan tata ruang di Indonesia. Mengatasi permasalahan tata ruang di Indonesia tidaklah mudah. Perlu adanya kerjasama semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat yang berperan aktif mendukung perencanaan tata ruang di Indonesia.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tata ruang di Indonesia mengacu pada UU No. 26/2007 mengenai penataan ruang. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Penataan Ruang

Sumber daya manusia yang baik akan mampu membuat detail tata ruang sebagai konsep pembangunan berbasis rencana, dimana hal itu sebagai cara untuk memeriksa pelanggaran pemanfaatan tata ruang serta sebagai dasar penegakan sanksi dan hukum. Sebagai contoh, hak penarikan kepemilikan tanah, penghancuran gedung dan lainnya.

Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan peningkatan kualifikasi pendidikan maupun pelatihan-pelatihan. Selain itu, perlu dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang memfasilitasi petugas perencanaan dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Implementasi hasil pendidikan dan latihan adalah menyusun rancangan tata ruang, baik skala nasional maupun daerah.

2. Penguatan Kerjasama Pemerintah Daerah

Penataan ruang yang mencakup beberapa daerah harus dapat di koordinasikan oleh pemerintah daerah dengan baik. Penataan ruang yang tepat dapat mengurangi permasalahan dan hambatan dalam penerapan tata ruang. Misalnya banjir di perkotaan harus diselesaikan dengan upaya terpadu antara daerah hulu sampai hilir. Kerjasama dan komunikasi antar daerah harus berjalan dengan baik sehingga permasalahan dapat teratasi.



Gambar 21. Kali Ciliwung menjadi permasalahan antar daerah

Sebagai contoh, Kali Ciliwung yang selalu membanjiri Jakarta, sebenarnya berujung dari Jawa Barat. Masalah terbanyak justru berasal dari Jawa Barat, seperti pembalakan liar, pendirian bangunan liar, termasuk pembuangan sampah ke sungai. Tetapi dampak terakhirnya, yaitu banjir, justru menggenangi Jakarta. Maka dalam penyelesaian masalah Kali Ciliwung harus ada kerjasama antar daerah Jakarta dan Jawa Barat.

3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

Selama ini pembangunan di suatu wilayah kurang melibatkan masyarakat. Akibatnya sering terjadi protes ataupun penolakan oleh masyarakat. Masyarakat sebagai orang yang terlibat langsung dalam pembangunan, baik sebagai pemakai maupun imbas, sudah seharusnya diikutsertakan dalam proses perencanaan tata ruang.

Peran serta masyarakat sangat penting dalam penerapan tata ruang wilayah. Masyarakat sebagai pelaku pembangunan dapat mendorong efektivitas proses penataan ruang. Selain itu, tata kehidupan sosial budaya wilayah tersebut tetap terjaga. Dalam sebuah penataan ruang yang baik, tidak ada yang merasa dirugikan, tetapi semua pihak merasa diuntungkan.

Namun sebaliknya, jika masyarakat tidak dilibatkan dalam tata ruang, akibat yang terjadi adalah muncul demonstrasi penolakan pembangunan. Seperti contoh yang sering terjadi adalah maraknya penggusuran pemukiman penduduk untuk kepentingan pihak tertentu.

4. Pemberian Sanksi untuk Menangani Para Pelanggar Tata Ruang

Dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang akan ada sanksi bagi siapapun (termasuk pemerintah) yang melanggar penggunaan lahan dan bangunan yang sudah ditetapkan di RTRW sebuah kota.

Ada 3 bentuk sanksi dalam pelanggaran tata ruang, yaitu:

- Sanksi administrasi: peringatan tertulis, denda administrasi.
- Penutupan kegiatan usaha dan pembongkaran bangunan.
- Sanksi pidana, berupa pemberian hukuman kurungan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara serta denda minimal 100 juta rupiah.



sumber: aktual.com

Gambar 22. Peran serta masyarakat diperlukan agar tidak terjadi demonstrasi

C. Pengembangan Wilayah Melalui Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan baik pengolahan lahan, penataan kota, pengembangan ruang bisnis, penataan pemukiman masyarakat serta berbagai pembangunan lainnya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tata ruang yang baik dalam pembangunan berkelanjutan tidak sekedar mengembangkan wilayah, tetapi lebih diarahkan pada penataan kelestarian lingkungan.

Pembangunan suatu negara selalu dihubungkan dengan peningkatan ekonomi. Jika negara ingin meningkatkan ekonominya, maka kunci utamanya adalah melakukan pembangunan yang mendukung sektor ekonomi. Namun pada kenyataannya, pembangunan lebih dari sekedar meningkatnya pendapatan per kapita penduduk. Pembangunan yang baik seharusnya lebih mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Pernahkah Anda mendengar tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH)? Ya, RTH adalah suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan dengan tanaman. Ruang Terbuka Hijau biasanya dibangun pada kawasan perkotaan, dengan tujuan untuk peresapan air, perindang, serta paru-paru kota. Tentu dari kawasan hijau ini akan menghasilkan oksigen untuk mengurangi karbon dioksida.

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Konsep dari pembangunan berkelanjutan dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi pada tahun 1992 yang diselenggarakan di Rio de Janeiro Brasil. Dari KTT Bumi ini menghasilkan dua gagasan penting, yaitu:

- a. Gagasan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan kaum miskin.
- b. Gagasan keterbatasan dalam rangka melestarikan sumber daya alam sesuai porsinya masing-masing sehingga pengelolaannya perlu diperhatikan agar dapat digunakan untuk masa kini hingga masa yang akan datang.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, memberi penjelasan tentang konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada kelanggengan sektor ekonomi. Adapun konsepnya adalah; tidak ada pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya alam, tidak ada dampak pada kerusakan lingkungan, dan kegiatan pembangunan harus meningkatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Prinsip-prinsip dalam pembangunan berkelanjutan, meliputi:

- a. Pemerataan dan keadilan sosial
- b. Menghargai keanekaragaman
- c. Pendekatan integratif
- d. Perspektif pada jangka panjang

Berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pengembangan wilayah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, maka pemerataan dan keadilan dalam pembangunan harus diutamakan. Hal ini agar setiap wilayah di Indonesia bisa berkembang dengan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Demikian juga dengan keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat, pembangunan berkelanjutan tidak boleh menghilangkan budaya, tetapi harus berpegang pada kearifan lokal. Paling utama dalam pembangunan berkelanjutan ini harus mengedepankan perspektif jangka panjang. Pembangunan harus bermanfaat untuk selamanya sampai anak cucu kita.

Sedangkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu; berkelanjutan ekologis (jaminan eksistensi sumber daya alam), berkelanjutan ekonomi (efisiensi ekonomi), dan berkelanjutan sosial (keanekaragaman budaya). Target yang hendak dicapai dituangkan dalam istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sendiri merupakan lanjutan dari program *Millenium Development Goals* (MDGs). Program MDGs sendiri diupayakan berhasil pada tahun 2000-2015 yang kemudian dilanjutkan oleh program SDGs hingga tahun 2030.

SDGs adalah rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs ini diharapkan akan terwujud pada tahun 2030.

Permasalahan yang sering dialami dalam pembangunan berkelanjutan adalah; kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi, masih terdapat keterbatasan akses pangan, serta banyaknya kerusakan lingkungan.

1. Masalah Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,82% dari total penduduk. Artinya penduduk Indonesia masih banyak yang miskin. Tentu hal yang demikian ini akan mempersulit arah pembangunan bangsa. Belum lagi masalah kemiskinan ini masih ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan serta pendapatan penduduk. Keadaan demikian ini merupakan masalah utama dalam memajukan Indonesia.



sumber: okeinfo.net

Gambar 23. Kemiskinan bisa menjadi kendala dalam pembangunan

Banyaknya penduduk yang miskin tersebut akan berdampak pada berbagai hal yang menghambat pembangunan. Dari segi sumber daya manusia, tentu sebagian besar dari mereka kurang berkualitas. Bagaimana dengan pola hidup bersih dan sehat? Tentunya mereka banyak yang tidak memerhatikan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan yang akan mempertinggi jumlah kematian.

2. Keterbatasan Akses Pangan

Negara Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Tapi pernahkah terpikir oleh Anda kalau bangsa kita masih impor beras, jagung, gula, bawang, kedelai dan masih banyak lagi hasil pertanian yang didatangkan dari luar negeri. Disebut sebagai negara pertanian, tetapi masih banyak penduduknya yang mengalami busung lapar. Mengapa bisa terjadi demikian?



sumber: medcom.id/www.pu.go.id

Gambar 24. Sebelum dan sesudah pembangunan jembatan Tumbang Sumba di Kalimantan Selatan (atas) dan pembangunan jalan Boven Digoel - Merauke, Papua (bawah)

Permasalahan pemenuhan kebutuhan bahan pangan di Indonesia adalah akses antar wilayah produsen pangan yang kurang mendukung. Sehingga distribusi bahan pangan dari satu wilayah ke tempat yang lain sering mengalami hambatan. Hal ini tentunya akan menyebabkan mahalnya harga bahan pangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan pembangunan infrastruktur penunjang untuk pendistribusian barang. Dibangunnya jalan tol dan tol laut diharapkan akan memangkas waktu dan biaya transportasi. Pembangunan jalan-jalan di berbagai pulau, seperti Trans Sumatera, Trans Sulawesi, Trans Papua, ini akan memberikan kemudahan pengangkutan bahan pangan ke berbagai daerah. Semoga saja dengan adanya pembangunan jalan-jalan lintas wilayah akan mempercepat kemajuan Indonesia.



sumber: mediaindonesia.com

Gambar 25. Kerusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal di Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Poso

3. Kerusakan Lingkungan

Membangun bukanlah merusak. Tetapi membangun seharusnya justru membuat kondisi menjadi lebih baik dan bermanfaat. Namun pada kenyataannya, sering terjadi pelaksanaan pembangunan yang mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan, akibatnya justru terjadi kerusakan lingkungan. Padahal dalam pembangunan berkelanjutan harus mengedepankan kelestarian lingkungan. Sebagai contoh, akibat yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan adalah banjir bandang yang melanda Wasior, Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat. Banjir bandang ini terjadi akibat penebangan hutan secara serampangan tanpa memerhatikan keselamatan lingkungan.

PENUGASAN 2

- a. Bacalah modul, buku referensi, majalah, serta berbagai media, carilah informasi tentang wilayah dan perwilayahan serta tata ruang.
- b. Buatlah catatan secara ringkas pada buku catatan pribadi untuk dipahami dan dilaporkan dalam pembelajaran tutorial, tentang:
 - 1) Permasalahan penerapan tata ruang di Indonesia.
 - 2) Mengatasi permasalahan penerapan tata ruang di Indonesia.
- c. Carilah informasi lain dari berbagai sumber terkait dengan wilayah dan perwilayahan serta tata ruang, untuk dipelajari sebagai bahan pengayaan, catat data/informasi yang Anda peroleh untuk didiskusikan

KEGIATAN TUTORIAL 2

Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil (misal: 1 kelompok terdiri dari 5 orang), berdiskusi bersama teman satu kelompok, kemudian peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi kelompok dan mengkomunikasikan hasil diskusi dipandu oleh tutor tentang:

- a. Permasalahan penerapan tata ruang di Indonesia.
- b. Mengatasi permasalahan penerapan tata ruang di Indonesia.

LATIHAN

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E.

1. Penataan ruang di beberapa wilayah yang ada di Indonesia masih mengalami kendala. Salah satu kendala tersebut adalah ...
 - A. Sulitnya proses pemetaan untuk informasi penataan ruang
 - B. Terbatasnya dana yang dialokasikan pemerintah untuk tata ruang
 - C. Minimnya kesadaran masyarakat tentang tata ruang wilayah
 - D. Belum terselesaikannya perencanaan tata ruang wilayah daerah
 - E. Lambatnya proses evaluasi dalam pelaksanaan tata ruang daerah
2. Perhatikan pernyataan berikut!
 - 1) Pemanfaatan dan pengendalian ruang belum efektif.
 - 2) Lembaga penyelenggara penataan ruang belum efektif.
 - 3) Adanya pemerataan antar wilayah Indonesia.
 - 4) Kerjasama pemerintah antar daerah di Indonesia sangat kuat.
 - 5) Belum tersedia sistem informasi terpadu untuk penataan ruang.

Hambatan penataan ruang di Indonesia ditunjukkan oleh pernyataan angka ...

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| A. 1, 2 dan 3 | C. 1, 2 dan 5 | E. 3, 4 dan 5 |
| B. 1, 2 dan 4 | D. 2, 3 dan 4 | |
3. Salah satu hambatan pembangunan pada kawasan Indonesia Timur seperti wilayah Papua antara lain ...
 - A. Sektor industri belum berkembang secara optimal
 - B. Mobilitas penduduk ke luar daerah rendah
 - C. Potensi perikanan tidak terpetakan dengan akurat
 - D. Nilai ekspor produk perikanan menurun
 - E. Produksi pangan terhambat perubahan iklim
 4. Dampak tidak tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada suatu wilayah akan berdampak pada ...
 - A. Potensi terjadinya banjir akan bertambah
 - B. Terdapat fungsi pengendalian pencemaran
 - C. Area peresapan air di perkotaan bertambah
 - D. Terhindar dari kerusakan tanah, air dan udara
 - E. Tempat pembangunan gedung semakin bertambah banyak

5. Pembangunan kawasan industri hendaknya berlokasi cukup jauh dari pemukiman penduduk. Kenyataannya banyak kawasan industri berdekatan dengan pemukiman. Fenomena tersebut menyebabkan permasalahan tata ruang yaitu ...
 - A. Pasokan produksi pertanian terbatas
 - B. Harga lahan permukiman penduduk tinggi
 - C. Jumlah penduduk disekitar kawasan insdustri menuru
 - D. Terjadi konflik sosial antara penduduk dan pihak industri
 - E. Kualitas penyelenggaraan penataan ruang tinggi
6. Jumlah dan persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan masalah ...
 - A. Konflik sosial antar daerahndan kurangnya pasokan pangan
 - B. Perluasan daerah otonomi dan permintaan impor kebutuhan sehari-hari
 - C. Alih fungsi lahan di daerah jarang penduduk dan potensi konflik sosial
 - D. Arus perpindahana penduduk rendah dan penataan ruang terbatas
 - E. Kekurangan sumberdaya manusia dan kesenjangan proses pembangunan
7. Kota Batam sebagai kota pusat pertumbuhan mempunyai masalah penggunaan lahan salah satunya adalah hunian liar. Peran tata ruang untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah ...
 - A. Membatasi interaksi penduduk yang tinggal di rumah liar
 - B. Menyediakan fasilitas rumah susun yang terjangkau bagi penduduk
 - C. Mengubah pemukiman kumuh menjadi pemukiman elite
 - D. Membuat peraturan tentang pendirian hunian
 - E. Memberikan pekerjaan bagi penghuni di pemukiman liar
8. Banyak pekerja di kawasan perkotaan namun tinggal di pinggiran kota atau bahkan luar kota. Kondisi ini menyebabkan tingginya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pembangunan wilayah yang menyediakan ruang untuk para pekerja salah satunya dengan ...
 - A. Menyediakan BBM bersubsidi untuk pekerja
 - B. Memindahkan kawasan industri
 - C. Memperluas ruang terbuka hijau
 - D. Memberbaiki kondisi jalan raya
 - E. Membangun rumah susun di tengah kota
9. Pengaruh kerusakan jalur transportasi terhadap interaksi antar wilayah adalah ...
 - A. Harga kebutuhan penduduk di setiap wilayah mengalami kenaikan
 - B. Wilayah fungsional mengalami hambatan dalam perkembangannya
 - C. Interaksi antar wilayah jadi semakin baik
 - D. Distribusi barang dan jasa semakin meningkat
 - E. Hambatan berupa fisik tidak mengalami perubahan
10. Tingginya intensitas hujan di kawasan Jakarta, Depok dan Bogor berpotensi menyebabkan banjir. Banjir berdampak pada kemacetan lalu lintas. Strategi penataan ruang yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah ...
 - A. Program reboisasi di kawasan hulu
 - B. Pelebaran wilayah sungai
 - C. Pembangunan drainase dan parit di hilir sungai
 - D. Pelarangan pemukiman di sekitar DAS
 - E. Penataan ruang terpadu pada DAS

B. Uraian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Penataan ruang di kawasan perkotaan sering mengalami kendala terutama banyaknya pemukiman kumuh. Bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut?
2. Salah satu upaya untuk mengatasi pelanggaran tata ruang di Indonesia yaitu dengan di buatnya sanksi. Menurut anda sanksi apa yang dapat di terapkan untuk mengatasi pelanggaran tata ruang di Indonesia?
3. Jelaskan dengan singkat hambatan-hambatan apa saja yang menghambat penerapan perencanaan tata ruang di Indonesia!
4. Upaya apa saja yang dapat mengatasi permasalahan tata ruang di Indonesia!
5. Mengapa konflik pemanfaatan ruang dapat menghambat penerapan tata ruang di suatu wilayah? Jelakan!

PENUGASAN AKHIR

- A. Peserta didik mencari Peta Wilayah (salah satu wilayah provinsi di Indonesia), beserta potensi sumber daya alam yang dimiliki. Peta dan data dapat dicari melalui internet atau atlas Indonesia.
- B. Peserta didik membuat tabel potensi wilayah dari setiap kota di provinsi tersebut, baik sumber daya alam maupun buatan manusia (industri, perdagangan dan jasa)
- C. Peserta didik membuat gambar rancangan tata ruang pada Peta Wilayah tersebut berdasarkan potensi wilayah yang dimiliki.

1. Tujuan

Setelah menyelesaikan tugas akhir diharapkan Anda mampu:

- a. Membaca peta wilayah provinsi, menganalisis potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi tersebut.
- b. Menjelaskan melalui tabel tentang potensi suatu wilayah
- c. Memiliki keterampilan membuat rancangan tata ruang suatu wilayah pada peta berdasarkan potensi yang dimiliki wilayah.

2. Media

- a. Kertas HVS atau folio bergaris
- b. Handphone, komputer/notebook/netbook, atlas.
- c. Aplikasi WhatsApp atau e-mail.

3. Langkah-langkah

- a. Bukalah hp, komputer/laptop atau atlas, lalu buka lewat google atau yahoo. Downlowd atau salin peta wilayah salah satu provinsi di Indonesia.
- b. Cermati dan klasifikasikan potensi wilayah, meliputi SDA, penduduk, bangunan dan sarana lainnya.

RANGKUMAN

- c. Sebutkan sumbernya.
- d. Ulas peta tersebut sesuai pendapat Anda dengan mengaitkan rencana tata ruang wilayah tersebut.
- e. Buat peta rancangan tata ruang wilayah tersebut.
- f. Tugas diserahkan pada Tutor atau kirim file dalam bentuk jpg/pdf/word melalui WhatsApp atau e-mail

4. Bentuk Tagihan

- a. Tabel potensi wilayah beserta rancangan tata ruangnya.

No	Kota/Kabupaten	Potensi yang Dimiliki	Rancangan Tata Ruang yang Akan Dikembangkan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

- b. Gambar peta tata ruang wilayah Provinsi.

1. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
2. Produk perencanaan tata ruang di Indonesia berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi antara lain sebagai acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) harus memperhatikan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. RTRWN merupakan acuan dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan RTRWP dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK).
4. Wilayah geografis pembangunan berhubungan dengan adanya wilayah pusat pertumbuhan. Pendekatan kewilayah diperlukan karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan khas sehingga membutuhkan perencanaan tata ruang.
5. Permasalahan penerapan tata ruang di Indonesia disebabkan oleh pemanfaatan dan pengendalian ruang belum efektif, lembaga peyelenggara penataan ruang belum efektif, sistem informasi penunjang belum optimal, potensi konflik pemanfaatan ruang masih tinggi dan adanya kesenjangan antar wilayah di Indonesia.
6. Permasalahan-permasalahan penataan ruang di Indonesia dapat di selesaikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk penataan ruang, penguatan kerjasam pemerintah daerah, peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dan pemberian sanksi untuk menangan para pelanggar tata ruang.



Kunci Jawaban

Unit 1: Latihan

Pilihan Ganda

No	Jawaban	No	Jawaban
1	A	6	B
2	C	7	E
3	E	8	D
4	D	9	B
5	A	10	C

Uraian

- Perencanaan tata ruang yang buruk akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dalam perencanaan tata ruang wilayah harus mengharuskan ada ruang hijau, jika tidak maka akan berakibat pada banjir.
- Fungsi perencanaan tata ruang antara lain:
 - Menghasilkan kualitas kehidupan dan penghidupan penduduk yang baik.
 - Memenuhi tujuan efisiensi dan demokrasi melalui partisipasi masyarakat
 - Memenuhi tantangan pembangunan berkelanjutan.
 - Menganalisis kondisi wilayah saat ini dan menginterpretasikan perkembangan wilayah pada masa datang.
 - Menentukan tujuan, sasaran, dan langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah.
- Kearifan lokal perlu dipadukan dengan tata ruang wilayah Perlu karena dengan adanya keterpaduan antara budaya lokal maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya konflik antar wilayah, dengan begitu persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia pun semakin erat dan dapat bersama-sama mengembangkan kearifan lokal Indonesia agar terkenal di mata dunia Internasional.
- Manfaat penyusunan tata ruang wilayah antara lain:
 - Menganalisa kondisi wilayah pada kondisi saat ini
 - Menginterpretasikan perkembangan wilayah pada masa yang akan datang
 - Menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
 - Menentukan langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah.
- Wilayah utama VII dengan kota pusat pertumbuhan Surabaya: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Unit 2: Latihan

Pilihan Ganda

No	Jawaban	No	Jawaban
1	A	6	C
2	C	7	D
3	B	8	E
4	A	9	B
5	D	10	C

Uraian

- Cara mengatasi wilayah banyaknya pemukiman kumuh di kawasan perkotaan yaitu dengan di buat aturan mendirikan bangunan. Pemerintah juga dapat menyediakan fasilitas rumah susun bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan resmi untuk mendirikan bangunan.
- Sanksi yang dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran tata ruang di Indonesia antara lain:
 - Sanksi administrasi: peringatan tertulis, denda administrasi
 - Penutupan kegiatan dan pembongkaran bangunan.
 - Sanksi pidana: pemberian hukuman kurungan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara serta denda minimal Rp 100 juta.
- Hambatan-hambatan yang dalam penerapan tata ruang di Indonesia antara lain:
 - Pemanfaatan dan pengendalian ruang belum efektif
 - Lembaga peyelenggara penataan ruang belum efektif
 - Sistem informasi penunjang pembangunan belum optimal
 - Potensi konflik ruang masih tinggi
 - Adanya kesenjangan antar wilayah di Indonesia
- Upaya yang dapat mengatasi permasalahan tata ruang di Indonesia antara lain:
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk penataan ruang
 - Penguatan kerjasama pemerintah daerah
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang
 - Pemberian sanksi untuk menangani para pelanggar tata ruang.
- Konflik pemanfaatan ruang dapat menghambat penerapan tata ruang di suatu wilayah karena dengan adanya konflik penggunaan ruang maka pemerintah pusat maupun daerah tidak bisa melakukan penataan ruang. Status kepemilikan lahan maupun pengelolaan bangunan yang tidak jelas akan menghambat penataan ruang oleh pemerintah.



Penilaian

Kriteria Penilaian Latihan Unit 1 dan 2

Setelah Anda mengerjakan soal latihan setiap unit, selanjutnya cocokkan dengan kunci jawaban yang sudah tersedia, atau bahaslah bersama tutor. Lakukan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pilihan Ganda

Setiap jawaban benar pada pilihan ganda diberi skor 1.

Jika benar semua mendapat skor 10

Jika salah semua mendapat skor 0

2. Uraian

Untuk penilaian uraian, ketentuan skor sebagai berikut:

No	Skor
1	2
2	2
3	4
4	4
5	3
Jumlah Skor Maksimal 15	

3. Penilaian

Nilai akhir yang diperoleh adalah: $\frac{\text{Jumlah skor Pilihan Ganda} + \text{Jumlah skor Uraian}}{25} \times 100$

Kriteria Penilaian Penugasan 1

Rubrik Penilaian: Perencanaan tata ruang dan wilayah geografis pembangunan secara mandiri

No	Aspek yang Dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Kelengkapan catatan				
2	Keruntutan catatan				
Skor Perolehan					

Kriteria:

1. Kelengkapan catatan:

Skor 4, jika melakukan pencatatan informasi secara lengkap dan benar

Skor 3, jika pencatatan cukup lengkap dan benar

Skor 2, jika kurang lengkap

Skor 1, jika tidak lengkap dan tidak benar

2. Keruntutan catatan:

Skor 4, jika melakukan pencatatan informasi secara runtut dan benar

Skor 3, jika pencatatan cukup runtut

Skor 2, jika kurang runtut

Skor 1, jika tidak runtut dan tidak benar

Kriteria Penilaian Penugasan 1

Rubrik Penilaian: Penerapan tata ruang di Indonesia secara mandiri

No	Aspek yang Dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Kelengkapan catatan				
2	Keruntutan catatan				
Skor Perolehan					

Kriteria:

1. Kelengkapan catatan:

Skor 4, jika melakukan pencatatan informasi secara lengkap dan benar

Skor 3, jika pencatatan cukup lengkap dan benar

Skor 2, jika kurang lengkap

Skor 1, jika tidak lengkap dan tidak benar

2. Keruntutan catatan:

Skor 4, jika melakukan pencatatan informasi secara runtut dan benar

Skor 3, jika pencatatan cukup runtut

Skor 2, jika kurang runtut

Skor 1, jika tidak runtut dan tidak benar

Kegiatan Penilaian Kegiatan Tutorial

Kegiatan Tutorial 1-2

Rubrik Penilaian: Diskusi Tutorial 1 dan 2

No	Aspek yang Dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Menyampaikan gagasan				
2	Menyampaikan jawaban				
3	Bekerjasama dengan teman				
4	Menghargai pendapat teman				
Skor Perolehan					

Kriteria:

1. Penyampaian gagasan:

- Skor 4, jika menyampaikan gagasan dalam diskusi secara lengkap dan benar
- Skor 3, jika penyampaian gagasan cukup lengkap dan benar
- Skor 2, jika penyampaian gagasan kurang lengkap
- Skor 1, jika penyampaian gagasan tidak lengkap dan tidak benar
- 2. Penyampaian jawaban:
 - Skor 4, jika menyampaikan jawaban dalam diskusi secara lengkap dan benar
 - Skor 3, jika penyampaian jawaban cukup lengkap dan benar
 - Skor 2, jika penyampaian jawaban kurang lengkap
 - Skor 1, jika penyampaian jawaban tidak lengkap dan tidak benar
- 3. Bekerja sama dengan teman:
 - Skor 4, jika dalam diskusi dapat bekerjasama dengan semua teman secara baik
 - Skor 3, jika dapat bekerjasama hanya dengan beberapa teman
 - Skor 2, jika kurang dapat bekerjasama dengan teman
 - Skor 1, jika tidak dapat bekerjasama dengan teman
- 4. Menghargai pendapat teman:
 - Skor 4, jika dalam diskusi dapat menghargai pendapat teman dengan baik
 - Skor 3, jika dapat menghargai pendapat beberapa teman
 - Skor 2, jika kurang dapat menghargai pendapat teman
 - Skor 1, jika tidak dapat menghargai pendapat teman

- Skor 2, jika keruntutan tulisan lengkap, benar tetapi tidak tepat
- Skor 1, jika tidak runtut
- 3. Bahasa
 - Skor 4, jika bahasa mudah dipahami
 - Skor 3, jika bahasa agak mudah dipahami
 - Skor 2, jika bahasa sulit dipahami
 - Skor 1, jika bahasa sangat sulit dipahami

Perolehan skor maksimal 12

Perolehan skor minimal 3

Penilaian Tagihan Akhir Modul: Nilai = $\frac{\text{Jumlah Skor}}{12} \times 100\%$

Kriteria Penilaian Penugasan Akhir

Rubrik Penilaian: Mengamati Potensi Wilayah

No	Aspek yang Dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Kelengkapan				
2	Keruntutan				
3	Aspek Bahasa				
Skor Perolehan					

Kriteria:

- 1. Kelengkapan Potensi
 - Skor 4, jika sangat lengkap mencakup seluruh wilayah provinsi
 - Skor 3, jika hanya mencakup $\frac{3}{4}$ wilayah provinsi
 - Skor 2, jika hanya mencakup setengah wilayah provinsi
 - Skor 1, jika hanya mencakup kurang dari $\frac{1}{4}$ wilayah provinsi
- 2. Keruntutan tulisan
 - Skor 4, jika keruntutan tulisan lengkap, benar dan tepat
 - Skor 3, jika keruntutan tulisan lengkap, benar dan kurang tepat

KRITERIA PINDAH MODUL

Untuk mengetahui ketuntasan belajar anda hitunglah tingkat penguasaan materi Anda dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai Ketuntasan Modul:

$$\frac{\text{Jumlah Skor Unit 1+Unit 2}}{50} \times 25\% \dots\dots\dots (a)$$

$$\text{Nilai Penugasan Akhir} \times 25\% \dots\dots\dots (b)$$

$$\text{Nilai Penugasan Mandiri} \frac{1+2}{2} \times 25\% \dots\dots\dots (c)$$

$$\text{Nilai Tutorial} \frac{1+2}{2} \times 25\% \dots\dots\dots (d)$$

$$\text{Nilai Ketuntasan} = \text{Jumlah Nilai (a) + (b) + (c) + (d)}$$

Anda dinyatakan TUNTAS jika batas nilai ketuntasan penguasaan materi minimal 75% ke atas. Sebaliknya, apabila pencapaian nilai ketuntasan Anda kurang dari 75%, maka Anda dinyatakan BELUM TUNTAS. Ulangi untuk mempelajari modul, terutama pada unit yang memperoleh nilai yang belum tuntas dan ulangi mengerjakan latihan soal terutama yang Anda jawab belum betul sampai Anda mampu menjawabnya dengan betul. Jika pengulangan anda telah mencapai batas minimal ketuntasan, silahkan lanjutkan untuk mempelajari modul berikutnya.



Saran Referensi

Untuk menambah peningkatan pengetahuan, peserta didik disarankan untuk membaca materi/bahan bacaan dari:

1. BSE Geografi SMA: Geografi untuk Kelas XII SMA/MA karangan Danang Endarto dkk (2009) ; Bab 5
2. BSE Geografi SMA: Geografi untuk Kelas XII SMA/MA karangan Nurmala Dewi (2009) ; Bab 3
3. BSE Geografi SMA: Geografi untuk Kelas XII SMA/MA karangan Eni Anjayani dan Tri Haryanto (2009) ; Bab 7
4. BSE Geografi SMA: Geografi untuk Kelas XII SMA/MA karangan Eko Titis Prasongko dan Rudi Hendrawansyah (2009) ; Bab 5
5. Buku Siswa Geografi untuk SMA/MA kelas XII karangan Nurul Khotimah dkk (2016); Bab 1



Daftar Pustaka

- Anjayani, Eni dan Tri Haryanto. 2009. Geografi untuk Kelas XII SMA /MA. BSE: Pusat Perbukuan Depdiknas
- Dewi, Nurmala. 2009. Geografi untuk Kelas XII SMA /MA. BSE: Pusat Perbukuan Depdiknas
- Endarto, Danang dkk. 2009. Geografi untuk Kelas XII SMA /MA. BSE: Pusat Perbukuan Depdiknas
- Khotimah, Nurul dkk. 2016. Buku Siswa Geografi untuk SMA/MA kelas XII. Klaten: Cempaka Putih
- Titis Prasongko, Eko dan Rudi Hendrawansyah. 2009. Geografi untuk Siswa Menengah Atas-Madrasah Aliyah Kelas XII SMA /MA. BSE: Pusat Perbukuan Depdiknas



Profil Penulis

Nama Lengkap : Ardi Anto

Sarjana Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Lampung (Unila) Lulusan tahun 2001

Saat ini sebagai Tenaga Fungsional Pamong Belajar

pada Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Lampung